

Tantangan Literasi dan Inklusi Dana Pensiun serta Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional dan Generasi Tua di Indonesia

Syarifudin Yunus¹, Farid Nabil Elsyarif²

Universitas Indraprasta PGRI¹, KKA Edial², Indonesia

Korespondensi Penulis: syarif.yunus@gmail.com

Abstract. *A study on the challenges of pension fund literacy and inclusion in Indonesia concluded that the average level of pension fund literacy in the period 2013 - 2025 only reached 18.08%, while the average level of inclusion in that period only reached 4.23%. The level of pension fund literacy and inclusion in Indonesia is low. In SNLIK 2025, the pension fund literacy rate was 27.79%, while the pension fund inclusion rate was 5.37%. Compared to the 2022 pension literacy rate of 30.46% and the 2022 inclusion rate of 5.40%, this means that pension literacy and inclusion rates are declining. It can be said that out of 10 Indonesians, only 2.7 people "understand" pension funds and only 0.5 (half) people "have" pension funds. This means that for every 10 Indonesians, less than 1 person has a pension fund. Low pension literacy and inclusion has a direct impact in the form of 1) an older generation at risk of poverty or financial dependence on children/family, 2) a continuing sandwich generation cycle, 3) stagnant growth of the pension fund industry, 4) low public trust, and 5) the emergence of public skepticism towards pension funds in the future.*

Keywords: *Challenges, Literacy, Inclusion, Pension Funds.*

Abstrak. Kajian tentang tantangan literasi dan inklusi dana pensiun di Indonesia menyimpulkan rata-rata tingkat literasi dana pensiun dalam kurun waktu 2013 – 2025 hanya mencapai 18,08%, sedangkan rata-rata tingkat inklusi pada periode tersebut hanya mencapai 4,23%. Tingkat literasi dan inklusi dana pensiun di Indonesia tergolong rendah. Pada SNLIK tahun 2025, tingkat literasi dana pensiun berada di level 27,79%, sedangkan tingkat inklusi dana pensiun di 5,37%. Bila dibandingkan dengan tingkat literasi dana pensiun tahun 2022 yang 30,46% dan tingkat inklusi tahun 2022 berada di 5,40% berarti tingkat literasi dan inklusi dana pensiun menurun. Dapat dikatakan dari 10 orang Indonesia, hanya 2,7 orang yang "paham" dana pensiun dan hanya 0,5 (setengah) orang yang "punya" dana pensiun. Artinya, tiap 10 orang Indonesia tidak sampai 1 orang yang memiliki dana pensiun. Rendahnya literasi dan inklusi dana pensiun memberi dampak langsung berupa 1) generasi tua yang berisiko mengalami kemiskinan atau ketergantungan finansial pada anak/keluarga, 2) siklus *sandwich generation* yang terus berlanjut, 3) pertumbuhan industri dana pensiun mengalami stagnan, 4) kepercayaan publik yang rendah, dan 5) timbulnya sikap skeptis masyarakat terhadap dana pensiun di masa mendatang.

Kata kunci: Tantangan, Literasi, Inklusi, Dana Pensiun.

1. PENDAHULUAN

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan literasi dana pensiun berada pada posisi 27,79%, sedangkan indeks inklusi dana pensiun justru turun dari 5,62% menjadi 5,37%. Hasil SNLIK tahun 2025 bidang dana pensiun menunjukkan masih adanya ketimpangan antara tingkat literasi dan inklusi dana pensiun dengan potensi angkatan kerja di Indonesia saat ini, yang mencapai 152 juta pekerja baik di sektor formal maupun informal.

Industri dana pensiun dihadapkan pada tantangan yang besar. Selain meningkatkan kepesertaan dan dana kelolaan, dana pensiun harus mampu mendongkrak tingkat literasi dan inklusi dana pensiun sebagai indikator tercapainya pemahaman dan kepemilikan masyarakat akan dana pensiun sebagai perencanaan hari tua. Kesenjangan tingkat literasi dan inklusi dana

pensiun harus dianggap serius. Apalagi bila dikaitkan dengan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara umum yang meningkat. SNLIK tahun 2025 menyebut indeks literasi keuangan sebesar 66,46%, sedangkan indeks inklusi keuangan menjadi 80,51%. Sementara indeks literasi dan inklusi dana pensiun masih jauh dari angka tersebut.

Industri dana pensiun sudah saatnya memetakan tantangan literasi dan inklusi dana pensiun. Masalah serius berkaitan dengan pemahaman dan kepemilikan dana pensiun di Indonesia yang tergolong masih sangat rendah. Tidak pahamnya masyarakat tentang pentingnya dana pensiun makin memperkuat banyak orang cenderung memprioritaskan kebutuhan dan keinginan yang bersifat jangka pendek (konsumsi, hiburan, gaya hidup) daripada memikirkan masa depan pensiun yang dianggap masih lama. Konsekuensinya, tidak sedikit pensiunan yang mengalami masalah keuangan di hari tua.

Faktanya, masih banyak pekerja atau masyarakat yang tidak mengerti cara kerja dana pensiun, tidak paham manfaat dana pensiun bahkan bagaimana imbal hasil dapat memperbesar manfaat pensiun. Ketidak-tahuan masyarakat untuk mendaftar dana pensiun menjadi persoalan mendasar di dana pensiun. Tidak tahu berapa besar iuran yang harus ditabung untuk masa pensiun? Minimnya edukasi dan sumber informasi yang dapat diakses masyarakat pun menjadi masalah literasi dan inklusi dana pensiun.

Tingkat inklusi dana pensiun saat ini hanya berada di 5,37%. Hanya sedikit orang yang memiliki dana pensiun. Dana pensiun lebih banyak diikuti oleh pekerja formal atau kantoran. Sementara pekerja sektor informal tidak memiliki akses dan edukasi soal dana pensiun. Produk dan layanan dana pensiun yang terjangkau belum memadai sehingga jadi sebab tingkat inklusi dana pensiun sangat rendah. Pekerja sektor informal sulit untuk bisa membayar iuran secara rutin, karena penghasilannya pun tidak tetap. Begitu pula UMKM yang masih memandang dana pensiun sebagai “barang mewah”. Hampir tidak ada kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki dana pensiun.

Literasi dan inklusi dihadapkan pada tantangan yang besar. Edukasi dana pensiun minim, ketersediaan akses untuk memiliki dana pensiun pun belum memadai. Maka sebagai akibat dari rendahnya tingkat literasi dan inklusi dana pensiun, angka kemiskinan di hari tua berpotensi meningkat. Survei ADB menyebut 1 dari 2 pensiunan di Indonesia mengandalkan transferan dari anaknya untuk biaya hidupnya (2024). Karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, industri dana pensiun, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi dana pensiun.

Atas latar belakang di atas, dibutuhkan informasi dan analisis lebih mendalam tentang tingkat literasi dan inklusi dana pensiun serta tantangannya. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui tantangan tingkat literasi dan inklusi dana pensiun serta solusi yang perlu dijalankan untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya dana pensiun. Kajian ini melibatkan 100 responden pekerja milenial di Jakarta, di samping dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap industri dana pensiun dalam menentukan strategi literasi dan inklusi dana pensiun dalam meningkatkan kepesertaan dan dana kelolaan dana pensiun di Indonesia.

2. KAJIAN TEORETIK

Pengetahuan tentang dana pensiun sangat penting karena berhubungan langsung dengan kestabilan keuangan di masa tua. Tanpa pemahaman yang optimal, seseorang bisa menghadapi kesulitan finansial setelah berhenti bekerja di masa pensiunnya. Lusardi dan Mitchell (2014) menegaskan bahwa pengetahuan keuangan adalah pengetahuan intelektual individu yang mempengaruhi perilaku mengelola keuangan pribadi untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini berarti, seseorang berpotensi mengalami masalah keuangan bila tidak memiliki pengetahuan yang memadai.

Pemahaman terhadap dana pensiun membutuhkan kesadaran, di samping edukasi yang memadai. Gallardo dan Libot (2017) mengemukakan bahwa literasi keuangan adalah gabungan dari kesadaran, pengetahuan, kemampuan, manajemen, serta perencanaan seseorang mengenai bisnis dan keuangan. Dengan demikian, tingkat literasi dana pensiun sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya perencanaan hari tua.

Kepemilikan atau tingkat inklusi dana pensiun sangat dipengaruhi oleh literasi dana pensiun. Inklusi dana pensiun merupakan konsep kepemilikan dana pensiun yang berdasarkan pemahaman dan tersedianya akses yang luas. Menurut Sarma (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk dana pensiun. Selain pemahaman yang baik, inklusi dana pensiun berkaitan erat dengan tersedianya akses untuk membeli dana pensiun.

Tersedianya akses menjadi bagian penting dari meningkatnya inklusi dana pensiun. Gerdeva dan Rhyne (2011) mendefinisikan inklusi dana pensiun sebagai kondisi di mana semua orang dapat mengakses produk dana pensiun yang berkualitas, tersedia dengan harga terjangkau, dengan cara yang nyaman dan memuaskan. Melalui inklusi dana pensiun, harapannya banyak orang dapat mencapai ketenangan di hari tua karena adanya kesinambungan penghasilan di masa pensiun, di saat tidak bekerja lagi.

Dana pensiun merupakan salah satu perencanaan keuangan yang sering kali diabaikan oleh banyak orang. Orientasi dana pensiun adalah hari tua. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (Pasal 134 UU No. 4/2023). Dengan demikian, dana pensiun dapat dinyatakan sebagai program yang dirancang untuk mempersiapkan keberlanjutan penghasilan saat masa pensiun atau hari tua.

Perwujudan dana pensiun adalah keikutsertaan seseorang dalam program pensiun. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi peserta (POJK No. 27/2023). Program pensiun yang ada saat ini dapat berbentuk: 1) Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) sebagai program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun dan 2) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) sebagai program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan PIIP.

Dana pensiun dinyatakan sejumlah uang yang dikumpulkan secara bertahap selama masa kerja aktif seseorang dan digunakan sebagai sumber pendapatan ketika pensiun. Program pensiun penting bagi pekerja karena dapat memberikan kesinambungan penghasilan di hari tua. Tanpa program pensiun, dapat dipastikan setiap pekerja tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai kehidupannya sendiri. Dari sisi perusahaan, program pensiun dibutuhkan untuk membayar imbalan pasacakerja, baik akibat pekerjaanya pensiun, meninggal dunia atau di-PHK (Syarif Yunus, Kompasiana.com, 2024). Dana pensiun memberikan manfaat utama kepada pekerja yang terdiri dari 1) adanya pendanaan yang pasti di masa pensiun, 2) adanya hasil investasi yang optimal selama menjadi peserta, dan 3) adanya insentif pajak saat manfaat pensiun dibayarkan kepada peserta.

Rendahnya kepesertaan dana pensiun, salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi dan inklusi dana pensiun yang masih rendah. Edukasi dan sosialisasi dana pensiun belum masif dan tidak berkelanjutan. Edukasi dana pensiun menjadi sangat penting sebagai kegiatan atau usaha menyampaikan pesan akan pentingnya dana pensiun kepada masyarakat, kelompok, atau individu dengan harapan agar pengetahuannya tentang dana pensiun dapat lebih baik (Notoatmodjo, 2010).

3. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dan analisis terhadap data untuk mengamati fenomena tingkat literasi dan inklusi dana pensiun. Survei dilakukan untuk

memperoleh informasi terkait dengan pengetahuan tentang dana pensiun dari 100 pekerja di Jakarta yang dilakukan pada Maret 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber seperti SNLIK tahun 2025 yang dikeluarkan OJK dan BPS, di samping data-data yang dimiliki peneliti terkait tingkat literasi dan inklusi dana pensiun.

Hasil penelitian diperoleh dengan melakukan analisis mendalam terkait fenomena tingkat literasi dan inklusi dana pensiun, termasuk tantangan dan solusi yang semestinya dilakukan. Analisis disajikan secara kualitatif dan kuantitatif.

4. PEMBAHASAN

Literasi dan inklusi dana pensiun sangat penting karena keduanya membantu masyarakat memahami, mengakses, dan memanfaatkan program pensiun untuk mencapai kesejahteraan finansial di masa tua. Terjaganya kesinambungan penghasilan seseorang di masa pensiun, saat tidak bekerja lagi, sangat bergantung pada tingkat literasi dan inklusi dana pensiun. Literasi dana pensiun berkaitan erat dengan sejauh mana seseorang memahami cara kerja dan manfaat dari dana pensiun. Inklusi dana pensiun bertumpu pada akses dan partisipasi masyarakat terhadap produk dana pensiun yang ada.

Literasi dana pensiun memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya dana pensiun. Melalui literasi dana pensiun yang baik, seseorang akan dapat menghindari kesalahan perencanaan keuangan untuk hari tua. Banyak pekerja kurang memahami pentingnya menabung untuk pensiun, sehingga mereka berisiko menghadapi kesulitan finansial setelah berhenti bekerja. Selain itu, literasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi dana pensiun sebagai instrumen investasi hari tua, di samping menyiapkan dana untuk masa pensiun sejak dini. Karena semakin awal seseorang mengikuti dana pensiun, maka semakin besar akumulasi dana pensiunnya.

Di sisi lain, inklusi dana pensiun menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kepesertaan dana pensiun melalui ketersediaan akses. Semakin tinggi inklusi dana pensiun maka semakin banyak peserta dana pensiun untuk menjaga kesinambungan penghasilan di hari tua. Tingkat inklusi dana pensiun yang meningkat juga dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat, utamanya di kalangan lansia atau pensiun. Karena itu, tanpa dukungan akses yang mudah dan luas, dana pensiun semakin sulit diminati masyarakat. Inklusi dana pensiun berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat pada dana pensiun. Inklusi yang baik dapat memastikan lebih banyak orang, termasuk pekerja informal, dapat memperoleh manfaat dari dana pensiun. Dalam jangka panjang, inklusi dana pensiun yang meningkat akan dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Pada kenyataannya, tingkat literasi dan inklusi dana pensiun di Indonesia tidak tumbuh dengan signifikan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat literasi dana pensiun mencapai 27,79%, sedangkan tingkat inklusi dana pensiun hanya 5,37%. Artinya, terdapat kesenjangan yang mencolok antara literasi dan inklusi dana pensiun. Idealnya dari 10 orang yang ada, bila ada 3 orang yang paham dana pensiun seharusnya yang memiliki atau punya dana pensiun ada 1 atau 2 orang. Tapi realitas saat ini, hanya 0,5 (separuh) orang yang memiliki dana pensiun.

Berdasarkan analisis data, tingkat literasi dan inklusi dana pensiun dalam 12 tahun terakhir (2013 s.s. 2025), berdasarkan SNLIK yang diterbitkan per tiga tahunan oleh OJK, diperoleh komposisi tingkat literasi dan inklusi dana pensiun sebagai berikut:

Tingkat Literasi dan Inklusi Dana Pensiun (Rentang 2013 – 2025)

	2025	2022	2019	2016	2013	Rerata
Literasi	27,79%	30,50%	14,10%	10,91%	7,13%	18,08%
Inklusi	5,37%	5,40%	6,18%	4,70%	1,53%	4,23%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat rata-rata tingkat literasi dana pensiun dalam kurun waktu 2013 – 2025 hanya mencapai 18,08%, sedangkan rata-rata tingkat inklusi pada periode tersebut hanya mencapai 4,23%. Maka dapat dinyatakan, tingkat literasi dan inklusi dana pensiun dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2025 tergolong rendah. Pada SNLIK tahun 2025, tingkat literasi dana pensiun berada di level 27,79%, sedangkan tingkat inklusi dana pensiun di 5,37%. Bila dibandingkan dengan tingkat literasi dana pensiun tahun 2022 yang 30,46% dan tingkat inklusi tahun 2022 berada di 5,40%. Artinya, dapat dikatakan tingkat literasi dan inklusi dana pensiun menurun. Tingkat literasi turun (2,67%), sedangkan tingkat inklusi dana pensiun turun (0,03%). Dengan begitu, dapat dikatakan dari 10 orang Indonesia, hanya 2,7 orang yang “paham” dana pensiun dan hanya 0,5 (setengah) orang yang “punya” dana pensiun. Artinya, tiap 10 orang Indonesia tidak sampai 1 orang yang memiliki dana pensiun.

Peta Jalan Pengembangan & Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 yang dikeluarkan OJK menyebutkan tingkat literasi dan inklusi dana pensiun yang rendah memiliki dampak yang signifikan, baik terhadap individu maupun industri. Individu yang belum mempersiapkan pensiun secara memadai dapat mengakibatkan kesulitan keuangan saat memasuki masa pensiun dan kesulitan dalam memilih produk dana pensiun yang sesuai sehingga menghambat pertumbuhan dana pensiun di Indonesia.

Kondisi ini menjadi bukti belum optimalnya persentase populasi yang memiliki akses ke dana pensiun, tingkat partisipasi yang rendah, atau tingkat keterjangkauan produk dana pensiun yang masih terbatas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penetrasi dan densitas dana pensiun di Indonesia, berbagai strategi dapat diimplementasikan diantaranya yaitu peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun melalui berbagai kegiatan yang edukatif dan kreatif, perluasan jaringan pelayanan dan akses yang lebih mudah, pemberian insentif pajak atau kebijakan fiskal lainnya, peningkatan peran lembaga pendidikan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi terkait dana pensiun, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program-program dana pensiun. Karena itu, OJK menargetkan pertumbuhan tingkat literasi dan inklusi dana pensiun masing-masing sebesar 5 % setiap tahun hingga tahun 2028.

dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks dan saling berkaitan. Beberapa tantangan utama literasi dan inklusi dana pensiun antara lain:

1. Minimnya tingkat literasi dana pensiun. Akibat kurangnya pemahaman tentang manfaat dana pensiun dan bagaimana cara kerjanya. Informasi dan edukasi dana pensiun masih sangat terbatas sehingga masyarakat, pekerja formal dan informal sulit mendapat akses. Masyarakat masih menganggap dana pensiun sebagai kebutuhan jangka panjang yang bisa ditunda.
2. Rendahnya inklusi dana pensiun. Hanya sekitar 4% dari total angkatan kerja formal yang memiliki dana pensiun. Pekerja sektor informal sama sekali belum tergarap dan belum mendapat edukasi akan pentingnya dana pensiun secara memadai. Minimnya partisipasi sektor informal terhadap dana pensiun.
3. Kurangnya edukasi dari pemberi kerja. Banyak perusahaan tidak memberikan pemahaman atau fasilitas dana pensiun tambahan (selain BPJS), di samping karyawan tidak diberi informasi yang memadai tentang pentingnya perencanaan pensiun sejak dini.
4. Stigma sosial dan budaya lama. Budaya “mengandalkan anak” di hari tua menjadi sebab pensiun tidak dianggap sebagai tanggung jawab pribadi. Menabung untuk masa pensiun dianggap hanya untuk orang kaya atau pegawai negeri bahkan berdalih “tidak punya dana” untuk ditabung ke dana pensiun.
5. Produk dana pensiun yang kurang menarik. Produk dana pensiun dianggap monoton dan kurang menarik masyarakat, apalagi dibandingkan dengan instrumen investasi lain (seperti reksa dana atau emas). Kurangnya kreativitas dalam mengemas produk dana pensiun yang sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen market, khususnya kurang fleksibel bagi pekerja sektor informal dan UMKM. Imbal hasil dana pensiun pun sering dianggap rendah dan minimnya transparansi pengelolaan kepesertaan.

6. Kurangnya inovasi dari pelaku dana pensiun. Pelaku dana pensiun dianggap minim inovasi teknologi atau digital pensiun untuk memperluas jangkauan produk dana pensiun. Belum ada pendekatan berbasis *mobile*, gamifikasi, atau integrasi dengan sistem *e-wallet* untuk meningkatkan inklusi dana pensiun.
7. Kebijakan dan regulasi yang masih berkembang. Harmonisasi program pensiun yang memadukan program pensiun wajib dan sukarela belum jelas, sosialisasi yang kurang, serta standar infrastruktur dana pensiun yang belum merata.

Isu rendahnya literasi dan inklusi dana pensiun harus dilihat sebagai masalah utama dari lambatnya pertumbuhan kepesertaan dan dana kelolaan dana pensiun di Indonesia. Karena itu, untuk menegaskan peta masalah literasi dan inklusi dana pensiun dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Kategori	Penyebab Utama
Individu	- Kurangnya pengetahuan dasar tentang dana pensiun - Prioritas jangka pendek lebih dominan (konsumsi sekarang vs simpanan masa depan) - Rendahnya kesadaran risiko finansial di masa tua
Sosial & Budaya	- Budaya mengandalkan anak di hari tua - Tabu membicarakan pensiun atau kematian di usia produktif
Pekerja Informal	- Tidak ada kewajiban mengikuti program pensiun - Fluktuasi penghasilan menyulitkan iuran/kontribusi rutin
Institusi/ Perusahaan	- Minimnya inisiatif perusahaan menawarkan dana pensiun tambahan - Kurangnya edukasi ke karyawan tentang manfaat program
Regulasi & Pemerintah	- Harmonisasi program pensiun untuk program pensiun tambahan bersifat wajib belum ada kejelasan - Sosialisasi masih terbatas - Tidak ada kampanye nasional pentingnya sadar pensiun
Pelaku Dana Pensiun	- Produk tidak menarik, rumit, dan kurang fleksibel - Distribusi produk belum menjangkau masyarakat luas (terutama pekerja informal/UMKM) - Belum ada platform digital dana pensiun

Upaya meningkatkan literasi dan inklusi dana pensiun sangat penting dan tidak layak ditunda lagi. Tanpa peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun, sangat berpotensi besar industri dana pensiun di Indonesia tidak akan tumbuh secara signifikan. Harus dicatat, saat ini peserta dana pensiun di Indonesia (DPPK – DPLK) hanya 4 juta orang, setelah dana pensiun berkiprah lebih dari 33 tahun (sejak tahun 1992). Bila dikalkulasi, berarti hanya 2,6% dari total angkatan kerja yang memiliki dana pensiun atau hanya 6,6% dari total pekerja sektor formal yang sudah punya dana pensiun. Industri dana pensiun belum mampu menyelaraskan hukum

“permintaan” dan “penawaran” di dana pensiun, seiring dinamika ketenagakerjaan yang terjadi. Oleh karena itu, literasi dan inklusi dana pensiun wajib ditingkatkan sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka panjang.

Melalui peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun, setidaknya memberikan keuntungan bagi para pemangku kepentingan. Pemahaman akan pentingnya dana pensiun meningkat, seiring dengan tersedianya akses dan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap produk atau layanan dana. Bagi individu atau pekerja, dana pensiun dapat menjamin standar hidup di hari tua, di samping memastikan tetap memiliki kesinambungan penghasilan setelah tidak lagi produktif. Menghindari ketergantungan finansial di hari tua dari anak atau keluarga sekaligus memutus rantai *sandwich generation*, di samping lebih siap menghadapi risiko hidup di masa pensiun bila terjadi sakit. Dana pensiun pun dapat membantu pengelolaan portofolio keuangan secara sehat untuk hari tua.

Bagi masyarakat, dana pensiun pasti dapat mengurangi beban sosial khususnya kalangan lansia, tidak membebani sistem sosial atau keluarga. Mampu membangun budaya menabung untuk jangka panjang dan dapat meningkatkan kualitas hidup lansia atau pensiunan yang lebih tenang dan nyaman. Bagi negara dan ekonomi nasional, dana pensiun pasti berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan dan kemiskinan lansia atau pensiunan, di samping dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang dan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan yang lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global.

Tanpa literasi dan inklusi dana pensiun yang meningkat signifikan, maka dampak langsung yang dapat dirasakan adalah 1) generasi tua yang berisiko mengalami kemiskinan atau ketergantungan finansial pada anak/keluarga, 2) siklus *sandwich generation* yang terus berlanjut, 3) pertumbuhan industri dana pensiun mengalami stagnan sehingga kehilangan potensi akumulasi dana jangka panjang yang besar dan berkontribusi terhadap ekonomi nasional, 4) kepercayaan publik terhadap dana pensiun yang rendah, dan 5) timbulnya sikap skeptis masyarakat terhadap dana pensiun di masa mendatang.

5. KESIMPULAN

Kajian tentang tantangan literasi dan inklusi dana pensiun di Indonesia menyimpulkan rata-rata tingkat literasi dana pensiun dalam kurun waktu 2013 – 2025 hanya mencapai 18,08%, sedangkan rata-rata tingkat inklusi pada periode tersebut hanya mencapai 4,23%. Tingkat literasi dan inklusi dana pensiun di Indonesia tergolong rendah. Pada SNLIK tahun 2025, tingkat literasi dana pensiun berada di level 27,79%, sedangkan tingkat inklusi dana pensiun di 5,37%. Bila dibandingkan dengan tingkat literasi dana pensiun tahun 2022

yang 30,46% dan tingkat inklusi tahun 2022 berada di 5,40% berarti tingkat literasi dan inklusi dana pensiun menurun. Dapat dikatakan dari 10 orang Indonesia, hanya 2,7 orang yang “paham” dana pensiun dan hanya 0,5 (setengah) orang yang “punya” dana pensiun. Artinya, tiap 10 orang Indonesia tidak sampai 1 orang yang memiliki dana pensiun.

Rendahnya literasi dan inklusi dana pensiun memberi dampak langsung berupa 1) generasi tua yang berisiko mengalami kemiskinan atau ketergantungan finansial pada anak/keluarga, 2) siklus *sandwich generation* yang terus berlanjut, 3) pertumbuhan industri dana pensiun mengalami stagnan, 4) kepercayaan publik yang rendah, dan 5) timbulnya sikap skeptis masyarakat terhadap dana pensiun di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2024). Aging well in Asia: Asian Development Policy Report. <https://doi.org/10.22617/SGP240253-3>
- Gallardo, M. L. C., & Libot, B. D. (2017). Financial literacy and retirement preparedness among University of Bohol employees. *University of Bohol Multidisciplinary Research Journal*, 5.
- Gerdeva, A., & Rhyne, E. (2011). Opportunities and obstacles to financial inclusion. Center for Financial Inclusion at ACCION International.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi penelitian kesehatan. Rineka Cipta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). POJK No. 27/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun.
- Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jakarta.
- Sarma, M. (2012). Index of financial inclusion – A measure of financial sector inclusiveness (Working Paper No. 07/2012). School of International Studies, Jawaharlal Nehru University.
- Yunus, S. (2025). Faktor penyebab pekerja tidak paham dana pensiun: Pentingnya edukasi dan digitalisasi industri dana pensiun di Indonesia. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(2). <https://manggalajournal.org/index.php/AKSIOMA/article/view/981/1239>